

Muhammadiyah Apresiasi Pemerintah terkait Perbedaan Idul Adha

Sabtu, 19-09-2015

Yogyakarta -Perbedaan baik itu Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha sudah sering terjadi, baik di tanah air, baik dalam pelaksanaan wukuf ibadah haji, seperti pada tahun 2014 lalu, Muhammadiyah penetapan Idul Adha sama dengan Arab Saudi, namun pemerintah RI berbeda dengan Arab Saudi, lalu tahun ini Pemerintah sama dengan Arab Saudi, dan Muhammadiyah berbeda. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam acara Jumpa Pers PP Muhammadiyah tentang Penetapan Idul Adha 1436 H di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat kemarin (18/9).

Menurut Haedar, Pemerintah sudah sangat berkemajuan dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan ini murni karena masalah ijtihad dalam menentukan waktu-waktu ibadah.

Muhammadiyah juga meminta kepada seluruh pihak, untuk memberikan sebuah toleransi dalam melaksanakan ibadah shalat Idul Adha pada tanggal 23 September 2015. "Ini merupakan hak konstitusi sebagai warga negara Indonesia", jelas Haedar.

Ia mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya mengizinkan dan mempermudah penggunaan fasilitas umum untuk pelaksanaan shalat Idul Adha karena melaksanakan ibadah merupakan hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dan dilindungi UUD 1945.

"Kami juga mengimbau warga Muhammadiyah agar dalam melaksanakan ibadah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, menjaga dan memelihara ukhuwah Islamiyah, ketertiban umum, dan toleransi terhadap umat Islam yang melaksanakan shalat Idul Adha pada hari yang berbeda," kata Haedar.

Pemerintah juga diminta memberi jaminan fasilitas, keamanan terhadap pelaksanaan shalat Idul Adha pada tanggal 23 September 2015 mendatang.

Persoalan penetapan kalender hijriyah Global, Muhammadiyah selalu memelopori kalender hijriyah global pada munas MUI dan kongres umat Islam. (dzar)